BAB II
LANDASAN TEORI

A. Tinjauan tentang Perencanaan Partisipatori.

1. Definisi Perencanaan Partisipatori.

Pada hakikatnya perencanaan adalah suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi (peristiwa, keadaan, suasana, dan sebagainya) dan apa yang akan dilakukan (intensifikasi, eksistensifikasi, revisi, renovasi, substitusi, kreasi, dan sebagainya). Rangkaian proses kegiatan itu dilaksanakan agar harapan tersebut dapat terwujud menjadi kenyataan di masa yang akan datang, yaitu dalam jangka waktu 1, 5, 10, 15, hingga 50 tahun yang akan datang.

Kajian tentang perencanaan pada dasarnya selalu terkait dengan konsep manajemen atau administrasi. Hal itu dapat dimaklumi karena baik dalam konsep manajemen ataupun administrasi, perencanaan merupakan unsur dan fungsinya yang pertama dan utama.

Sebagai salah satu fungsi manajemen, perencanaan menempati fungsi yang pertama dan utama diantara fungsi-fungsi manajemen yang lain, misalnya POAC, PDCA, dan sebagainya. Menempatkan perencanaan dalam fungsi pertama. Para pakar manajemen menyatakan bahwa apabila perencanaan telah selesai dan dilakukan dengan benar maka sebagian besar pekerjaan telah selesai dilaksanakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perencanaan didefinisikan dalam berbagai macam ragam tergantung dari sudut pandang mana melihat, serta latar belakang apa yang mempengaruhi orang tersebut dalam merumuskan definisi. Diantara beberapa definisi tersebut akan diuraikan sebagaimana berikut;

Menurut Prajudi Atmoudirdjo, perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam mencapai tujuan tentang oleh siapa, dan bagaimana.

Bintoro Tjokroamidjojo, 1977. Mengemukakan bahwa perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.[1]

Perencanaan merupakan suatu proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan atau harus diimplementasikan. Setiap saat selama proses implementasi dan pengawasan, rencana-rencana mungkin memerlukan modifikasi agar tetap berguna. Karena perencanaan menjadi factor kunci pencapaian sukses akhir, maka harus mempertimbangkan kebutuhan fleksibilitas, agar mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi baru secepat mungkin.[2]

Made Pidarta dalam bukunya menjelaskan ada beberapa ahli yang memberikan definisi tentang perencanaan yaitu;

---

[1] Udin Syaefudin Sa'ud, Abin Syamsudin Makmun, *Perencanaan Pendidikan; Suatu Pendekatan Komprehansif,* (Bandung; PT. Remaja Rosda Karya, 2007) 3-4

[2] Hani Handoko, *Manajemen ed-2,* (Yogyakarta; BPFE, 2000) 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Cunningham, bahwa perencanaan adalah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta-fakta, dan imajinasi-imajinasi dan asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang untuk tujuan memvisualisasikan dan memformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan yang diperlukan dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima yang akan digunakan dalam penyelesaian.

b. Arthur W. Steller dalam bukunya "curriculum planning" mengemukakan bahwa perencanaan adalah hubungan antara apa adanya sekarang (what is) dengan bagaimana seharusnya (what should be) yang bertalian dengan kebutuhan, penentuan tujuan, prioritas, program, adan alokasi sumber. Perencanaan di sini menekankan pada usaha mengisi kesenjangan antara keadaan sekarang dengan keadaan masa yang akan datang yang sesuai dengan yang dicita-citakan.

c. Stephen P. Robbins "The Administration of Process" menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu cara mengantisipasi dan mengembangkan perubahan.

Ketiga definisi yang telah dikemukakan di atas memperlihatkan rumusan dan tekanan yang berbeda. Yang pertama mencari wujud yang akan datang serta mencari usaha mencapainya. Sedangkan yang kedua berusaha menghilangkan kesenjangan antara keadaan sekarang dengan keadaan yang akan datang. Sedangkan yang ketiga ingin mengubah keadaan agar sejalan dengan lingkungan yang juga berubah. Tetapi pada hakikatnya semuanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki kesamaan yaitu sama-sama ingin mencari dan mencapai wujud yang akan datang, tetapi yang pertama dan yang kedua tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa wujud yang dicari itu akibat dari terjadinya perubahan, termasuk perubahan dalam cita-cita.[3]

Berbagai pengertian dan pandangan tentang pandangan tentang perencanaan di atas tidak dimaksudkan untuk memunculkan atau menambah kebingungan. Dengan pemaparan tersebut diharapkan kita memiliki wawasan dan pemahaman yang luas mengenai perencanaan. Dengan demikian, diharapkan pemahaman tentang perencanaan menjadi kepemilikan sendiri, dapat membentuk pola fikir yang jernih, yang selanjutnya mampu menjelaskan pengertian perencanaan dalam bahasa dan pemahaman sendiri pula.

Telah lanjut, Bedjo Siswanto menegaskan bahwa suatu proses perencanaan adalah aktivitas yang saling kait mengkait dan berusaha mengefektifkan serta mengefisiensikan proses dari suatu organisasi sebagai suatu sistem. Sistem disini difahami sebagai bahwa untuk mencapai tujuan organisasi mengharuskan adanya energi antar subsistem. Berdasarkan definisi tersebut, perencanaan minimum mempunyai 3 karakteristik, yaitu;

a. Perencanaan tersebut harus menyangkut masa yang akan datang.
b. Rencana harus menyangkut tindakan.

---

[3] Made Pidarta, *Perencanaan Pendidikan Partisipatori dengan Pendekatan Sistem,* (Jakarta; RInneka Cipta, 2005) 1-3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Terdapat suatu elemen identifikasi pribadi atau organisasi yaitu serangkaian tindakan di masa yang akan datang yang akan diambil oleh perencana atau seorang yang ditunjuk olehnya atau atas namanya dalam organisasi.[4]

Perencanaan adalah kegiatan pertama yang harus dilaksanakan dalam administrasi. Rencana merupakan serangkaian keputusan sebagai pedoman pelaksanan kegiatan di masa yang akan datang. Rencana yang baik hendaknya diarahkan kepada tujuan (goal oriented). Rencana secara jelas dapat dikemukakan sebagai;

a. Apa yang akan dicapai, berkenaan dengan penentuan tujuan.
b. Mengapa hal itu perlu dilakukan, berkenaan dengan alasan atau motif perlunya kegiatan tersebut.
c. Bagaimana akan dilaksanakan, berkenaan dengan prosedur kerja, sasaran dan biaya.
d. Bilamana akan dilaksanakan, berkenaan dengan menjadwalkan kegiatan kerja atau pelaksanaan dengan prosedur kerja atau pentahapan kegiatan sampai dengan selesai.
e. Siapa yang akan melaksanakan, berkenaan dengan orang-orang yang turut terlibat dalam penyelesaian kegiatan-kegiatan.

---

[4] Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen; Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2001) 3-4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Mengadakan penelitian berkenaan dengan kegiatan, maka yang telah selesai, sedang dan akan diselesaikan.

g. Kemungkinan-kemungkinan apa yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dan kegiatan mengadakan penyesuaian dan perubahan rencana.[5]

Kata partisipatori berasal dari kata partisipasi yaitu pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Dari keterangan di atas, dapat diartikan bahwa perencanaan partisipatori adalah perencanaan yang melibatkan beberapa orang yang berkepentingan (stakeholder pendidikan; kepala sekolah, guru, orang tua siswa, tokoh masyarakat) dalam merencanakan sesuatu yang dipertentangkan dengan merencanakan yang hanya dibuat oleh beberapa orang seperti mereka yang mempunyai wewenang dan kedudukan.[6]

Tanpa ada kerja sama, sebenarnya lembaga pendidikan telah kehilangan sebagian fungsinya, begitu pula halnya dengan masyarakat. Lembaga pendidikan tidak lagi berfungsi sebagai penerang dan pembaruan masyarakat. Masyarakat tidak lagi member dukungan moral dan material kepada lembaga pendidikan, berarti sama kurang menghiraukan perkembangan putra-putranya. Yang akhirnya dapat merugikan kedua belah pihak, maka lebih dari itu, bangsa dan Negara akan ikut menderita. Masyarakat dan bangsa sudah tentu tidak ingin hal seperti itu akan terjadi.

---

[5] A.W. Widjaya, *Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen*, (Jakarta; Bina Aksara, 1987,) 8-9
[6] Made Pidarta, *Perencanaan*..., 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh sebab itu hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat perlu ditingkatkan.[7]

Guru-guru diharapkan menjadi rantai penghubung antara rumah, para siswa dan sekolah. Dengan kerja sama, para orang tua dan guru-guru dapat menyiapkan bersama situasi yang kaya akan informasi yang akan digunakan untuk membuat sekolah sebagai tempat memperoleh pengalaman positif baik bagi para siswa maupun bagi para anggota keluarga lainnya. Juga Karena pendidikan didukung secara langsung dan tidak langsung oleh para orang tua, mereka punya hak dan tanggung jawab untuk terlibat di dalamnya. Melalui kerja sama ini para orang tua akan meneruskan dukungan mereka kepada sekolah baik secara financial maupun ide-ide.[8]

Rumusan mengenai proses hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat dapat dilaksanakan sebagai berikut;

a. Rencanakan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat dan monitor hubungan tersebut dilakukan oleh suatu tim. Tim tersebut hendaklah terdiri dari wakil-wakil pengajar, orang tua, dan siswa.
b. Tentukan frekuensi dan efektifitas komunikasi. Alat-alat komunikasi dapat dipilih satu atau beberapa dari;
   1) Barang cetakan,
   2) Audiovisual,

[7] Made Pidarta, *Perencanaan...*, 33
[8] Made Pidarta, *Perencanaan...*, 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Media identitas lembag; kartu uniform, lambing, gedung, dsb.

4) Surat kabar,

5) Kejadian-kejadian; pertemuan, ceramah, dan kegiatan lainnya,

6) Menghadirkan ahli pidato untuk mempopulerkan lembaga,

7) Layanan telepon umum, dan

8) Kontak perorangan.

Masing-masing alat komunikasi tersebut hanya cocok untuk kegiatan kerjasama tertentu.

c. Personalia sekolah perlu dimotivasi untuk berpartisipasi dan didasarkan akan kepentingan kondisi rumah dan tetangga bagi kemajuan para siswa. Tim mengadakan pertemuan-pertemuan dengan para personalia itu, mengajak mereka berpartisipasi dan bergotong royong melaksanakan tugas bersama.

d. Memotivasi para orangtua/masyarakat untuk berpartisipasi dalam program hubungan dengan lembaga pendidikan dan menyarankan kepada mereka untuk ikut mengambil keputusan. Keputusan yang diambil bersama oleh lembaga pendidikan, masyarakat, dan wakil-wakil siswa lebih menjamin kelancaran pelaksanaannya dari pada kalau diputuskan hanya oleh lembaga pendidikan saja.

e. Libatkan pra orang tua dalam perencanaan tentang pendidikan putra-putra mereka. Dan libatkan pula mereka dalam memonitor kemajuannya. Dengan teknik pelibatan ini para orangtua akan merasa ikut sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian dalam personalia pendidikan, ikut memiliki lembaga pendidikan itu, dan ikut memperjuangkannya untuk mensukseskan putra mereka dan kemajuan lembaga.

f. Libatkan para orang tua/masyarakat dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan performa putra mereka. Misalnya kenakalan baik di rumah maupun dalam lembaga, kelalaian dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberi oleh lembaga, dan sebagainya. Kerjasama ini dimasukkan agar masalah itu lebih mudah dipecahkan dan para orangtua lebih memperhatikan serta waspada terhadap putra-putra mereka.

g. Beri dorongan kepada orangtua agar ikut mendidik putra-putri mereka, seperti belajar yang teratur, selalu hadir di sekolah, dan sebagainya.

h. Lembaga pendidikan harus melaporkan kemajuan para siswa kepada orangtua secara teratur dan bermakna. Yang dimaksud bermakna di sini bukanlah hanya melaporkan kemajuan itu dalam bentuk tertulis saja melainkan perlu dilengkapi penjelasan-penjelasan yang dianggap penting.

Antar hubungan lembaga pendidikan dengan komunikasinya merupakan dasar untuk memudahkan pelaksanaan perencanaan partisipatori. Hal seperti ini meletakkan sikap dan kebiasaan lembaga pendidikan dan masyarakat bekerjasama membangun pendidikan. Komunikasi antar lembaga pendidikan dengan masyarakat merupakan realisasi teori *Common Sense* dalam komunikasi, bukan teori kompetisi atau teori control.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bentuk komunikasi yang diuraikan di atas bukan didasarkan pada kompetisi antar lembaga pendidikan dengan masyarakat. Bukan pula bermaksud lembaga pendidikan agar mengontrol dengan ilmu dan pengetahuannya yang berlimpah atau sebaliknya agar masyarakat mengontrol lembaga pendidikan dengan anggapan bahwa lembaga pendidikan menyembunyikan sesuatu. Melainkan karena adanya tiga kepercayaan;

a. Orangtua mempunyai hak untuk memahami keadaan lembaga pendidikan,
b. Pengetahuan/pemahaman dapat membuat hubungan baik antar lembaga pendidikan dengan masyarakat, dan
c. Hubungan baik tersebut akan memperbaiki sikap dan belajar siswa.

Hubungan yang baik antar lembaga pendidikan dengan masyarakat atas dasar *common sense* dengan komunikasinya yang lancar member peluang yang besar kepada para perencana melaksanakan perencanaan partisipatori. Suatu perencanaan yang dikerjakan bersama antar personalia lembaga pendidikan dengan orangtua siswa serta dengan tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang berminat akan pendidikan.[9]

2. Teori Perencanaan Partisipatori.

Perencanaan pendidikan di Indonesia diarahkan pada relevansi, efisiensi dan efektifitas pendidikan, sehingga sasaran pendidikan akan tercapai sesuasi dengan yang telah digariskan. Hanya saja dalam tataran implementasi apa yang telah digariskan seringkali berbeda dengan kenyataan di lapangan,

[9] Made Pidarta, *Perencanaan*..., 34-36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga optimalisasi kinerja manajemen pendidikan belum berjalan sesuai harapan.

Tujuan demokrasi yang dikehendaki masyarakat Indonesia saat ini berpengaruh terhadap penerapan desentralisasi pendidikan sebagai wujud dari keinginan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Paradigma lama yang bersifat sentralisasi telah bergeser dengan lahirnya UU no. 22 tahun 1999 dan UU no. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah dan UU no. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang memberikan kewenangan lebih luas pada propinsi, kabupaten dan kota untuk mengelola daerahnya masing-masing sesuai dengan aspirasi masyarakat dan potensi yang dimilikinya.[10]

Dengan adanya hal tersebut, memunculkan perencanaan partisipatori sebagai salah satu cara untuk mengimplementasikan apa-apa yang telah digariskan oleh lembaga guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Untuk lebih mengenal lebih jauh tentang perencanaan partisipatori, kita akan membahas mengenai teori-teori perencanaan partisipatori.

Dalam kaitannya dengan teori perencanaan, Hudson membagi lima teori perencanaan, yaitu; radical, advocacy, transactive, synoptic, dan incremental yang dikatakan sebagai taxonomy. Dengan menggabungkan dari berbagai beberapa teori yang ada, Tanner mencoba membuat teori sendiri

---

[10]Udin Syaefudin S dan Abin Syamsudin M., *Prencanaan...*, 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang disebut dengan teori SITAR. Untuk lebih mempermudah pemahaman, teori-teori tersebut akan diuraikan sebagai berikut;

a. Teori Radical

Teori ini menitik beratkan kebebasan lembaga atau organisasi lokal untuk melakukan perencanaan sendiri, dengan maksud agar lebih cepat mengubah keadaan lembaga dan sesuai dengan kebutuhan. Pandangan para penganut teori ini adalah tidak ada lembaga pendidikan atau organisasi pendidikan lokal yang sama persis dengan yang lain. Oleh karena itu perencanaan harus dilakukan oleh lembaga atau organisasi lokal itu sendiri karena hanya perencanaan yang bersifat desentralisasi dengan partisipasi maksimum dari individu dan minimum dari pemerintah pusat atau manajer tertinggilah yang dapat dipandang sebagai perencanaan yang benar.

Dengan partisipasi maksimum dari individu-individu dalam lembaga pendidikan atau organisasi pendidikan lokal dimaksudkan untuk mempercepat perkembangan personalia agar mampu menangani lembaganya sendiri terutama dalam perencanaan. Partisipasi ini juga mengacu pada pentingnya kerjasama antar personalia Dengan kata lain teori radikal menginginkan agar lembaga pendidikan dapat mandiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menangani lembaganya. Begitu pula pendidikan daerah dapat mandiri menangani pendidikannya.[11]

b. Teori Advocacy

Berbeda dengan teori radikal, maka teori advocer menekankan hal-hal yang bersifat umum dan jamak. Perbedaan-perbedaan lembaga, lingkungan, dan daerah tidak perlu dihiraukan. Dasar perencanaan tidak bertitik tolak pada pengamatan secara empiris, tetapi atas dasar argumentasi yang rasional, logis, dan bernilai.

Kebaikan teori ini adalah untuk kepentingan umum secara nasional. Karena ia meningkatkan kerjasama secara nasional, toleransi, kemanusiaan, perlindungan terhadap minoritas, menekankan hak sama, dan meningkatkan kesejahteraan umum. Teori ini tepat dilaksanakan oleh pemerintah atau badan pusat.

c. Teori Transactive

Teori ini menekankan harkat individu, menjunjung tinggi kepentingan pribadi. Keinginan, kebutuhan-kebutuhan, dan nilai-nilai individu diteliti satu persatu sebelum perencanaan dimulai. Kontak empat mata dilakukan berkali-kali, komunikasi antar pribadi diadakan. Demikianlah ide-ide dievolusikan secara perlahan-perlahan kepada orang-orang yang menaruh perhatian terhadap pendidikan terutama dikalangan personalia lembaga pendidikan.

---

[11] Made Pidarta, *Perencanaan* ... 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teori ini juga menekankan sifat perencanaan yang desentralistik, suatu desentralisasi yang transactive yaitu berkembang dari individu ke individu secara keseluruhan. Ini berarti penganutnya juga menekankan perkembangan individu dalam kemampuan mengadakan perencanaan. Perencanaan yang dilakukan oleh personalia lembaga pendidikan itu sendiri menunjukan perkembangan lembaga lebih maju, berarti terkandung pula di dalamnya ada usaha untuk mengembangkan organisasi pendidikan dari dalam.[12]

d. Teori Synopnic

Diantara teori-teori yang sudah dibahas, teori synoptic ini yang paling komprehensif. Sebab itu dalam kepustakaan sering disebut system planning, rational system approach, atau rational comprehensive planning. Teori ini memakai model berfikir sistem dalam perencanaan. Obyek yang direncanakan sebagai satu kesatuan yang bulat, dengan tujuannya yang satu disebut misi. Obyek atau tujuan diuraikan menjadi bagian-bagian dengan memakai model analisa sistem, sehingga menampakkan strukturnya. Dengan menstruktur sistem sampai kepada komponen-komponennya, maka perkerjaan perencanaan menjadi lebih mudah karena tugas menjadi lebih spesifik.

Proses perencanaan synoptic memakai langkah-langkah sebagai berikut;

---

[12] Made Pidarta, *Perencanaan*..., 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pengenalan problem dan lingkungan.
2) Mengestimasi ruang lingkup problem dan lingkungan.
3) Mengklasifikasi kemungkinan penyelesaian.
4) Menginvestigasi problem dan lingkungan.
5) Memprediksi alternatif.
6) Mengevaluasi kemajuan dan penyelesaian yang spesifik.[13]

e. Teori Incremental

Teori ini memusatkan perencanaan kepada kemampuan lembaga dan performa personalianya. Teori ini berhati-hati sekali terhadap ruang linkup obyek yang ditanganinya. Obyek yang ditangani selalu diukur dan dibandingkan dengan kemampuan lembaga dan personalia, kalau dapat dikerjakan dengan perkiraan hasil yang memadai maka barulah direncanakan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perencanaan tidak disebut jangka panjang sebab disamping sukar meramal dalam waktu yang panjang juga sukar menentukan kemampuan lembaga dan performan personalianya. Jadi, perencanaan ini menekankan pada perencanaan jangka pendek saja. Perencanaan untuk masa beberapa tahun dilakukan dengan menambahkan perencanaan-perencanaan pendek yang sudah lampau.

[13] Made Pidarta, *Perencanaan*..., 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perencanaan ini juga menekankan sifat desentralisasi. Ia selalu mengadakan kontak hubungan dengan lingkungan atau masyarakat. Artinya si perencana dalam merencanakan obyek tertentu selalu mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan. Hal ini mengingatkan kita pada perencanaan dengan pendekatan sistem. Memang teori ini sudah menggunakan pendekatan sistem, hanya dipakai dalam waktu yang terbatas, yakni jangka pendek.

Apa alasan perencanaan ini menekankan pada perencanaan jangka pendek? Karena jangka pendek lebih riil dan mudah diwujudkan dibandingkan dengan jangka panjang. Cunningham menyebut teori ini sebagai *"art of the possible"* yang dia pertentangkan dengan *"art of ideal"* terhadap perencanaan sistem yang berjangka panjang. Teori ini juga disebut *"disjointed-incrementalist"* model adalah konsep pembentukan yang kontinyu pada situasi yang sedang berlangsung, setapak demi setapak, dan dengan tingkat perubahan yang kecil.

Yang dimaksud dengan situasi yang sedang berlangsung di atas adalah situasi sekarang., yang dapat diartikan masa perencanan yang pendek yaitu 1 tahun. Teori ini diilhami oleh filsafat pragmatisme, yang menyatakan yang baik adalah yang berguna pada masa sekarang. Yang berguna pada masa sekarang hanya dapat ditentukan dan dicari pada masa sekarang. Kita tidak tahu apa-apa dengan masa depan dan memang tidak perlu tahu karena belum member manfaat kepada kita. Tujuan dan alat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam filsafat ini adalah sama. Tidak ada tujuan yang tepat, ia selalu berubah bersamaan dengan perubahan alat untuk mencapai tujuan itu.

Dasar argumentasi teori disjointed-incrementalist ini adalah;

1) Nilai, tujuan, dan empiris tidak terpisah satu dengan yang lain, melainkan sebagai suatu tenunan,
2) Bila alat dan tujuan terpisah maka mereka sering terpisah atau tidak cocok,
3) Test untuk perencanaan yang baik ialah kesepakatan antara kecocokan alat dengan pencapaian tujuan,
4) Analisa subjektif tentang kemungkinan hasil, alternatif-alternatif, dan nilai-nilai efektif cenderung dilalaikan, dan
5) Bukti akhir perencanaan yang efektif adalah apakah ia diterima dalam arti bisa diimplementasika dengan sukses.[14]

f. Teori SITAR

Teori SITAR adalah diambil dari huruf depan kelima teori diatas, yaitu *synoptic, incremental, transactive, advocacy,* dan *radical.* Ini menunjukkan bahwa teori SITAR adalah gabungan dari kelima terori tersebut. oleh Tanner dikatakannya sebagai *complementary planning process* yaitu suatu proses saling melengkapi antara kelima teori di atas. Kelima teori itu yang dinyatakan sebagai tradisional, bila masing-masing

[14] Made Pidarta, *Perencanaan*..., 23-24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipraktekkan terpisah ia akan mencapai sasaran yang tidak lengkap, sebab masing-masing mempunyai ciri dan penekanannya sendiri.

Masyarakat dan lembaga pendidikannya yang direncanakan tidak selalu konstan, mereka selalu berubah. Satu daerah belum tentu sama dengan masyarakat atau lembaga pendidikan daerah yang lain dalam waktu yang sama. Masyarakat umum atau nasional belum tentu sama dengan masyarakat daerah. Kepribadian masyarakat tertentu belum tentu sama dengan kepribadian masyarakat lain. Kita sebenarnya menghadapi pelbagai corak masyarakat dan lembaga pendidikan secara ruang maupun waktu. Kita tidak dapat menerapkan satu teori tradisional saja dalam merencanakan pendidikan mereka.

Oleh sebab itu, semua teori yang ada harus digunakan. Itulah proses perencanaan yang baru. Dalam kondisi tertentu kita perlu memakai teori radikal bila hal itu kita pandang cocok. Dalam kondisi yang lain kita dapat menggunakan teori transactive bila individu-individu daerah atau lembaga itu sangat sensitive terhadap masalah-masalah pendidikan. Begitu pula kita dapat menggunakan teori advocacy bila kita memandang masyarakat umum lebih dipentingkan daripada masyarakat daerah dalam obyek tertentu yang kita rencanakan. Malah beberapa teori dapat digunakan sekaligus dalam satu perencanaan bila ternyata dengan tiba-tiba kondisi mengalami perubahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena teori ini memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat atau lembaga tempat perencanaan itu akan diaplikasikan, maka teori ini menjadi SITARS, yaitu S terakhir adalah menunjuk huruf awal dari kata *situational.* Berarti teori baru ini disamping mengkombinasikan teori-teori yang sudah ada, penggabungan itu sendiri ada dasarnya, ialah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi lembaga pendidikan dan masyarakat.[15]

g. Teori atau Model Lain

Di samping keenam teori yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa model perencanaan yang tidak dimasukkan ke salah satu teori-teori itu. Dua diantaranya adalah simulasi dan game atau permainan.

Mengapa simulasi dan game dapat dimasukkan sebagai teori, konsep, atau model? Sebab keduanya memenuhi kriteria yang dituntut oleh suatu model. Kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu model adalah;

1) Memiliki langkah-langkah proses atau langkah-langkah dalam membuat konsep.
2) Terdapat *prespective origins* yaitu wawasan yang asli dari orang-orang atau kelompok yang terlibat dalam proses.
3) Memiliki *representation form* yaitu bentuk konsep yang final.

Seorang calon guru merencanakan mengajar di kelas melalui latihan mengajar terhadap teman-temannya sekelas adalah model perencanaan

[15] Made Pidarta, *Perencanaan*..., 25-26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

simulasi. Dalam model ini ada langkah proses, yaitu si calon mempersiapkan diri di rumah secara lisan maupun tertulis dalam bentuk persiapan mengajar. Kemudian mengajar temannya, lalu dapat koreksi dan umpan balik dari teman-temannya dan guru pembimbingnya, kemudian melakukan perbaikan. Metode mengajar dan usaha menguasai kelas adalah merupakan ide asli dari si calon guru, walaupun ide itu sangat mungkin kombinasi dari ide-ide yang sudah ada. Tetapi yang jelas tidak ada satu ide pun yang cocok diterapkan pada semua situasi kelas. Sampai akhirnya ia mempunyai konsep yang relatif jelas tentang bagaimana ia akan mengajar di kelas sesungguhnya. Konsep ini adalah hasil perencanaan model simulasi.

Dalam perencanaan lembaga pendidikan kadang-kadang seorang perencana belum tahu tentang apa yang harus ia kerjakan dalam merencanakan perbaikan suatu unit sekolah, misalnya usaha meningkatkan komitmen para guru dalam aktivitas sekolah. Salah satu cara yang dia tempuh adalah langsung terjun berpura-pura menjadi personalia tetap pada kantor pendidikan tingkat kabupaten yang membawahkan beberapa kepala sekolah. Melalui kerja sama yang akrab, dengan kunjungan berkali-kali ke sekolah, secara diam-diam ia mempengaruhi guru-guru, menciptakan iklim yang baru, membentuk mekanisme kerja yang lebih baik dan sebagainya. Sampai suatu ketika ia melihat bahwa benar-benar terjadi peningkatan komitmen para guru. Dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keberhasilan ini dia analisa faktor-faktor yang dia kreasikan tadi, mana yang berpengaruh terhadap komitmen itu. Hasil analisa lalu ia olah menjadi konsep pengembangan komitmen guru. Konsep ini adalah merupakan perencanaan model simulasi.

Bila simulasi-simulasi seperti itu dilakukan oleh beberapa perencana, masing-masing di tempat yang berbeda, tetapi obyek yang direncanakan sama, hal ini dapat menjadi game atau dapat juga tidak. Ia akan menjadi model game jika ada usaha membandingkan antara yang satu dengan yang lainnya, dengan aturan permainan yang sesuai. Atas dasar aturan itu, perencana dapat dinyatakan sebagai pemenang yang kemudian hasil perencanaannya akan diambil untuk diimplementasikan lebih luas.[16]

3. Prosedur Perencanaan Partisipatori

Setiap kegiatan mempunyai prosedur, yaitu suatu cara yang ditempuh dalam kegiatan itu untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Prosedur dalam perencanaan adalah cara yang ditempuh oleh para perencana untuk merealisasikan usahanya agar dapat terwujud suatu konsep perencanaan. Prosedur perencanaan adalah langkah-langkah yang ditempuh dalam proses perencanaan. Prosedur yang ditempuh oleh para perencana pendidikan seringkali bervariasi, tetapi dalam garis besarnya adalah sama.[17]

---

[16] Made Pidarta, *Perencanaan*..., 26-28
[17] Made Pidarta, *Perencanaan*..., 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rencana memberikan sasaran bagi organisasi dan menetapkan prosedur untuk mencapainya. Selain itu, rencana memungkinkan;

a. Organisasi memperoleh serta mengikat sumber-sumber daya yang diperlukan mencapai tujuannya.
b. Para anggota organisasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang konsisten dengan berbagai tujuan dan prosedur yang telah dipilih.
c. Kemajuan dapat terus dimonitor, sehingga tindakan korektif dapat diambil bila tingkat kemajuan tidak memuaskan.[18]

Suatu prosedur memberikan sejumlah instruksi yang terperinci untuk pelaksanaan serangkaian kegiatan yang terjadi secara teratur. Instruksi-instruksi terperinci ini mengarahkan para karyawan dalam pelaksanaan tugas-tugas dan membantu untuk menjamin pendekatan yang konsisten pada situasi tertentu. Prosedur paling tidak sangat berguna untuk;

a. Menghemat usaha manajerial.
b. Memudahkan pendelegasian wewenang dan penempatan tanggung jawab.
c. Menimbulkan pengembangan metoda-metoda operasi yang lebih efisien.
d. Memudahkan pengawasan.
e. Memungkinkan penghematan personalia.
f. Membantu kegiatan-kegiatan koordinasi.[19]

---

[18] James A.F Stoner dan Charles Wankel, *Perencanaan dan Pengambilan Keputusan Dalam Manajemen*, terjm; Sahat Simamora (Jakarta; Rineka Cipta, 1993) 22

[19] Hani Handoko, *Manajemen*..., 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai prosedur atau langkah dalam perencanaan, ada syarat-syarat yang perlu diperhatikan ketika menyusun perencanaan, yaitu;

a. Perencanaan harus didasarkan atas tujuan yang jelas.
b. Bersifat sederhana, realistis dan praktis.
c. Terinci, memuat segala uraian serta klasifikasi kegiatan dalam rangkaian tindakan sehingga mudah dipedomani dan dijalankan.
d. Memiliki fleksibilitas sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi dan situasi sewaktu-waktu.
e. Terdapat perimbangan antara bermacam-macam bidang yang akan digarap dalam perencanaan itu menurut urgensinya masing-masing.
f. Diusahakan adanya penghematan tenaga, biaya, dan waktu serta kemungkinan penggunaan sumber-sumber daya dan dana yang tersedia dengan sebaik-baiknya.
g. Diusahakan agar sedapat mungkin tidak terjadi adanya duplikasi pelaksanaan.[20]

Berkaitan dengan prosedur perencanaan, Morphet mengingatkan kepada kita apa yang perlu diperhatikan bila membuat perencanaan. Prosedur-prosedur tersebut antara lain;

a. Mengumpulkan informasi dan analisa data.

---

[20] Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung; Remaja Rosda Karya, 1991) 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menyelesaikan perubahan dalam bentuk kebutuhan.

c. Mengidentifikasi tujuan dan prioritas.

d. Membentuk alternatif-alternatif penyelesaian.

e. Mengimplementasi, menilai, dan memodifikasi.

Sedangkan menurut William G. Cunningham, prosedur atau langkah-langkah perencanaan, sebagai berikut:

a. Menentukan tujuan dan kebijakan.

b. Menentukan alat-alat yang akan dipakai mencapai tujuan tersebut.

c. Menentukan sumber-sumber pendidikan seperti materi, uang, personalia, dan media belajar.

d. Mengorganisasi yaitu memperbaiki hubungan antara orang-orang dengan kelompok.[21]

Di samping hal di atas, sebagai pembanding Hani Handoko merumuskan langkah-langkah dan tahapan-tahapan dalam perencanaan pendidikan pada tataran sistemnya (operasional, institusional, dan struktural) dapat dijelaskan sebagai berikut;

a. Mendefinisikan permasalahan perencanaan, meliputi; ruang lingkup permasalahan, pengkajian sejarah pendidikan, perbedaan antara kenyataan dan harapan, sumber daya dan hambatan perencanaan, serta menentukan bagian-bagian dari perencanaan beserta prioritasnya.

---

[21] Made Pidarta, *Perencanaan Pendidikan*... 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Analisa bidang telaah permasalahan perencanaan, meliputi; bidang atau wilayah dan sistem-sistem sub-bidang telaah, pengumpulan data, tabulasi data, dan perkiraan perencanaan.

c. Mengkonsepsikan dan merancang rencana, meliputi; mengidentifikasi kecenderungan umum, menentukan tujuan dan sasaran, serta mendesain perencanaan.

d. Evaluasi rencana, meliputi; perencanaan melalui evaluasi, evaluasi perencanaan dan pemilihan perencanaan.

e. Menentukan rencana; rumusan masalah dan laporan hasil.

f. Implementasi rencana; persiapan program, persetujuan perencanaan, dan pengaturan unit-unit operasional perencanaan.

g. Evaluasi implementasi rencana dan umpan baliknya, meliputi; monitoring rencana, evaluasi rencana, serta menyelesaikan, mengubah dan mendesain ulang rencana.[22]

Dari sejumlah prosedur yang sudah dikemukakan oleh para ahli, nampaknya tidak mudah bagi lembaga dan personalianya untuk mengimplementasikanya, untuk itu dibutuhkan keseriusan dan kerja keras dari pihak mereka demi tercapainya tujuan perencanaan, yang tidak lain adalah terwujudnya pengembangan lembaga dan peningkatan profesionalitas personalianya khususnya guru yang akan bersentuhan langsung dengan anak didiknya. Pengembangan-pengembangan tersebut berusaha untuk

[22] Udin Syaefudin, *Perencanaan pendidikan* .., 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merekonstruksi kebiasaan otoriter tradisional di lembaga guna mendorong kerjasama, pengambilan keputusan yang desentralisasi, terbuka dan bersifat sahabat atau musyawarah.

4. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Penerapan Perencanaan Partisipatori

Kurang lebih sekitar 25 tahun (1945-1970) sistem pendidikan di seluruh dunia sangat dipengaruhi oleh adanya perubahan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, ekonomi, dan politik. Perkembangan itu memberikan tekanan dalam masalah pendidikan yang jauh lebih berat dan semua itu harus dihadapi. Mereka telah berhasil mengatasi masalah-masalah tersebut, tetapi manajemen dan perencanaan sebagai alatnya telah terbukti sangat kurang tepat untuk situasi terbaru ini. Secara jujur pula harus mengagumi bahwa mereka telah berhasil menghadapi ketegangan-ketegangan dan kegagalan, serta lebih dapat dimengerti bahwa dengan ujian pengalaman yang berat itu suatu bentuk perencanaan yang baru akan menjadi sangat penting, sebagai ciri utama yang harus dimiliki.

Terjadinya Perang Dunia II telah mengakibatkan kekacauan dalam sistem pendidikan di beberapa Negara. Kebanyakan Negara menginginkan kembali pada sistem pendidikan yang normal seperti sebelum perang. Beberapa masalah mereka hadapi, pembangunan sekolah yang tertunda untuk memenuhi para veteran yang kembali, masalah tenaga kerja, dan sumber daya manusia yang dituntut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi serta masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peningkatan masalah sejumlah murid yang timbul oleh faktor kependudukan. Maka untuk mengatasi masalah tersebut dengan sistem perencanaan pendidikan yang konvensional saja tidak dapat memenuhi tugas rekonstruksinya. Untuk itu diperlukan perencanaan yang kompleks dan mempunyai pandangan ke depan.[23] Maka sangat tepatlah bila perencanaan partisipatori sebagai pemecah dari segala masalah yang ada. Seperti yang dikemukakan pada pembahasan di muka. Dengan perencanaan partisipatori segala permasalahan akan mudah diselesaikan karena kebijakan bersama-sama antara pihak lembaga dengan masyarakat selaku stake holder pendidikan.

Tugas utama para ahli perencanaan sesungguhnya adalah membina perencana-perencana tingkat lokal atau daerah agar dapat merencanakan daerahnya masing-masing dengan baik. Hanya mereka sebenarnya dapat merencanakan lembaga-lembaga pendidikan dengan baik, sebab mereka yang tahu kondisi daerahnya, cita-cita masyarakat, kemampuan masyarakat, dan lembaga mereka yang menghayati keadaan itu dan mereka pula yang sangat berkepentingan akan hasil pembaharuan lewat perencanaan itu.[24]

Jadi perencanaan sekarang tidak lagi memakai pendekatan tradisional yang kebutuhan pendidikannya ditentukan dari luar seperti konsultan atau administrator tertinggi, tetapi memahami pendekatan baru yaitu para penentu

---

[23] Udin Syaefudin, *Perencanaan Pendidikan*..., 32
[24] Made Pidarta, *Perencanaan Pendidikan*..., 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan itulah yang melakukan perencanaan sendiri, inilah yang disebut dengan perencanaan partisipatori. Dengan kata lain perencanaan partisipatori melibatkan semua personalia lembaga pendidikan dan masyarakat melalui wakil-wakilnya dari kegiatan penentuan kebutuhan sampai dengan perencanaan itu berhasil.[25]

Dengan berpartisipasi dalam perencanaan, komitmen personalia terhadap pelaksanaan pendidikan akan menjadi lebih tinggi, cita-cita mereka semakin meningkat, mereka saling bahu-membahu dan cinta akan pekerjaan. Mereka mengembangkan ketrampilan dan pengetahuannya, mereka bermotivasi tinggi untuk sukses. Hal itu semua diperkuat dengan dikeluarkannya UU no 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah dan UU no 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah serta memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing. Diantara beberapa keunggulan perencanaan partisipatori adalah sebagai berikut;

a. Partisipasi yang besar atau kuat tanpa memandang tingkat ekonomi, memajukan komunikasi dalam perencanaan pendidikan.
b. Menemukan sendiri kondisi dan nilai yang berubah akan merupakan dasar yang berarti bagi perencanaan pendidikan.[26]

---

[25] Made Pidarta, *Perencanaan*..., 38
[26] Made Pidarta, *Perencanaan*..., 39-40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hubungan sekolah dan masyarakat seperti telah diuraikan di atas, diharapkan sekolah tidak lagi harus ketinggalan dengan perubahan dan tuntutan masyarakat yang senantiasa berkembang, apalagi menghadapi abad ini, ketika masyarakat berubah dan berkembang dengan sangat pesatnya akibat majunya teknologi. Sehingga seperti disebutkan oleh Tilaar, sekolah semakin tercecer dan terisolasi dari masyarakat, sekolah lebih berfungsi sebagai penjara intelek. Maka untuk memperoleh kembali fungsinya yang sebenarnya sekolah harus merupakan salah satu pusat belajar dari banyak pusat belajar.

Adanya hubungan sekolah dengan masyarakat dalam perencanaan pendidikan diharapkan proses belajar yang berlaku di masyarakat mengalami perubahan, dari proses belajar dengan cara "menyuapi" dengan bahan pelajaran yang telah dicerna oleh guru menjadi proses belajar mengajar yang inovatif yaitu belajar secara antisipatoris dan partisipatoris. Proses belajar yang inovatif itu tidak hanya "belajar memecahkan masalah" tetapi justru yang lebih penting ialah mengidentifikasi, mengerti, dan bila perlu merumuskan kembali masalah itu. Anak-anak didik diajak dan dididik untuk berpartisipasi dalam arti luas di dalam kehidupan masyarakat dan dapat mengantisipasi kehidupan masyarakat yang akan datang tempat mereka akan hidup dan terlibat di dalamnya setelah mereka dewasa.[27]

---

[27] Ngalim Purwanto, *Administrasi*..., 196

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan antara lain untuk:

a. Memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak
b. Memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat.
c. Menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah[28]

Hubungan sekolah dengan masyarakat begitu baik, rasa tanggung jawab dan partisipasi masyarakat dalam setiap perencanaan dan implementasinya untuk memajukan sekolah juga akan baik dan tinggi.

Latar belakang perlunya perencanaan dilakukan untuk mencapai dua hal, yaitu;

a. "Protective benefits" yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan.
b. "Positive benefits" dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan organisasi.[29]

Kemudian lebih rinci lagi, mengenai latar belakang penerapan perencanaan partisipatori yaitu faktor-faktor atau tujuan-tujuan penting dibalik hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat dalam kaitannya dengan perencanaan lembaga. Ngalim Purwanto dalam bukunya Administrasi dan Supervisi Pendidikan membagi dalam empat faktor, yaitu;

a. Memelihara keberlangsungan hidup sekolah.

---

[28] E.Mulyasa,*Manajemen*.....50
[29] Hani Handoko, *Manajemen*..., 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Meningkatkan mutu sekolah.

c. Memperlancar proses belajar mengajar.

d. Memperoleh dukungan dan bantuan dari masyarakat dalam pengembangan dan pelaksanaan program sekolah.

Sedangkan menurut Elsbree dan MC. Nally, hal yang melatarbelakanginya dikarenakan ada tiga tujuan pokok, yaitu;

a. Untuk mengembangkan mutu belajar dan pertumbuhan anak-anak.

Kemajuan konsep-konsep pendidikan menunjukkan kepada guru-guru di sekolah agar pendidikan dan pengajaran tidak lagi *subjet matter centered*, tetapi hendaknya *community life centered*, yaitu tidak lagi berpusat pada buku saja tetapi berorientasi pada kehidupan anak didik nanti di masyarakat.

b. Meningkatkan tujuan dan mutu kehidupan masyarakat.

Sekolah menjadi lebih maju sehingga mampu menjadi pelopor dan pusat perkembangan bagi perubahan-perubahan masyarakat di dalam bidang-bidang seperti; ekonomi, kebudayaan, pengetahuan, dan teknologi.

c. Mengembangkan pengertian, antusiasme, dan partisipasi masyarakat.

Pendidikan sebenarnya bukan tugas dan tanggung jawab sekolah dan pemerintah saja melainkan masyarakat karena sebenarnya merekalah yang sering bersentuhan dengan anak didik dalam kesehariannya. Pendidikan tidak memandang seks, umur, golongan atau keyakinan, dan pendidikan juga tidak terbatas pada sekolah saja, tetapi juga lembaga-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga lain seperti tempat bekerja. Bisa juga dalam lingkungan keluarga dan masyarakat dimana di situlah bukan hanya pengajaran yang diperoleh tetapi juga tauladan, komunikasi, dan sosialisasi pada umumnya.[30]

B. Tinjauan tentang Profesionalitas Guru

1. Pengertian Profesionalitas Guru

Sebagaimana teorinya Nana Sudjana yang telah dikutip oleh Drs. M. Uzer Usman bahwa kata professional berasal dari kata sifat yang berarti pencaharian, dan sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian. Maksudnya, pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain.[31]

Dalam oxford dictionary dijelaskan profession is a vacation in which a professed knowledge of same departement of learning or sciences used in its application to the affairs of others or in the practice of art founded upon it.[32] yang mempunyai maksud dalam suatu pekerjaan profesional diperlukan teknik serta prosedur yang bertumpu pada landasan intelektual yang dipelajari dari suatu lembaga.

Definisi lain menyebutkan, profesi adalah suatu pekerjaan yang didasarkan atas studi atau pendidikan intelektual khusus yang tujuannya

---

[30] Nngalim Purwanto, *Administrasi*...., 190-193
[31] M. Uzer Usman, Menjadi Guru Professional, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999)14
[32] The Oxford English Dictionary, (New York: The Calenden Press, 1993)1427

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Definisi lain menyebutkan, profesi adalah suatu pekerjaan yang didasarkan atas studi atau pendidikan intelektual khusus yang tujuannya memberikan pelayanan yang terampil dengan imbalan upah atau gaji yang ditentukan.[33]

Secara singkat, Hornby E. A. menunjukkan pengertian profesi sebagai suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan yang lanjut dan latihan khusus.[34]

Dari itu semua dapat diketahui bahwa suatu profesi menuntut persyaratan yang mendasar ketrampilan teknis lebih rinci, serta kepribadian tertentu. Karena tidak semua pekerjaan menunjuk pada suatu profesi.

Selain pengertian diatas, ada beberapa ahli yang juga memberikan konstribusi pemikirannya mengenai hal ini, yaitu:

a. Drs. A. Samana yang telah mengutip dari J. Sudarminto dalam bukunya menjelaskan bahwa guru yang berkualifikasi professional yaitu guru yang tahu secara mendalam tentang apa yang diajarkannya secara efektif dan efisien dan guru tersebut berkepribadian mantap.[35]

b. Dr. Suharsimi Arikunto, mengutip dari Mochtar Bukhori (1984) menjelaskan perbedaan antara profesi dan hobi

   - Profesi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan nafkah

---

[33] Philip Robinson, *Beberapa Persepektif Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali, 1986)166
[34] Roestiyah N. K., *Masalah-Masalah Ilmu Keguruan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982)176
[35] A. Samana, Profesionalisme Keguruan, (Yogyakarta: Kanisius, 1994)21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Hobi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh kesenangan.[36]

c. Orntein dan Levine (1984) mendefinisikan profesi sebagai jabatan, agar jabatan dapat dikatakan profesi sebagaimana dikutip Prof. Soetjipto dan Drs. Raflis Kosasi, M. S. C. mengenai pengertian profesi sebagai berikut :

- melayani masyarakat merupakan karir sepanjang usia (tidak berganti-ganti pekerjaan).
- Memiliki ilmu dan ketrampilan khusus yang tidak semua orang memilikinya.
- Diperlukan waktu yang relatif lama dan adanya pelatihan khusus.
- Adanya komitmen terhadap jabatan dank lien dengan penekanan terhadap layanan yang akan diberikan.[37]

National Education Center (NEA) sebagaimana yang dikutip Prof. Soetjipto dan Drs. Raflis Kosasi, M. S. C. memberikan uraian mengenai jabatan yang dikategorikan profesi sebagai berikut:

a. Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual
b. Jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus
c. Jabatan yang memerlukan kesiapan yang lama
d. Jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan
e. Jabatan yang menjanjikan kariri hidup dan keanggotaan yang permanent

---

[36] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)231

[37] Soetjipto dan Raflis Kosasi, *Profesi Keguruan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999)16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Jabatan yang menentukan baku standartnya sendiri

g. Jabatan yang lebih mementingkan layanan diatas kepentingan pribadi

h. Jabatan yang kuat dan terjalin erat[38]

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, nampaknya guru sangat sulit sekali dikategorikan Sebagai suatu profesi karena tidak semua guru bisa memenuhi kriteria diatas. Walaupun demikian, sebagai usaha untuk mengarah kejabatan profesi, pemerintah juga tidak tinggal diam seperti dikeluarkannya UU guru dan dosen. Dan juga adanya peraturan dari menteri pendidikan dan kebudayaan bahwa yang boleh menjadi guru hanya yang mempunyai akta mengajar yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK).[39]

Menurut Manap Sumantri (1996) yang mengutip dari Volmer (1996) dan Oteng (1989), beliau menjelaskan tentang standart profesi sebagai berikut:

a. Mempunyai keilmuan yang diperoleh melalui pendidikan lama (S1) atau lebih

b. Klien mengakui keprofesionalannya

c. Memiliki kode etik

d. Memiliki budaya profesi yang dinamis dan berkembang

e. Ada sejuta profesi yang kuat dan berpengaruh[40]

---

[38] Soetjipto dan Raflis Kosasi, *Profesi*....,18
[39] Soetjipto dan Raflis Kosasi, *Profesi*....,26
[40] Made Pidarta, *Landasan Kependidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997)267

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana ungkapan B. J. Chandler yang dikutip oleh Prof. Drs. A. Sahertian menegaskan bahwa profesi mengajar adalah suatu jabatan yang mempunyai kekhususan yang memerlukan kelengkapan mengajar atau ketrampilan yang menggambarka bahwa seseorang melakukan tugas mengajar yaitu membimbing manusia.[41]

Menurut H. M. Arifin, profesionalitas keguruan tidak lain adalah seperangkat fungsi dan tugas dalam lapangan pendidikan dan latihan khusus dibidang pekerjaan yang mampu mengembangkan kekayaannya secara ilmiah, disamping mampu memenuhi bidang profesinya selama hidupnya, mereka itu adalah guru yang professional yang mempunyai kompetensi keguruan berkat pendidikan dan latihan di lembaga pendidikan guru dalam jangka waktu tertentu.[42]

Berkaitan dengan ini, profesionalitas guru diartikan sebagai suatu pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dan melibatkan kegiatan intelektual serta memerlukan persiapan yang lama dan memahami visi dalam pekerjaannya secara filosofis.

Guru yang professional akan bekerja melaksanakan fungsi dan tujuan pendidikan, dalam hal ini ia akan berusaha melaksanakan amanat yang telah diembatnya dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

---

[41] Piet A. Sahertian, *Profil Pendidikan Professional*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994)26

[42] H.M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993)106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ciri-ciri dan syarat-syarat profesionalitas guru

Untuk mendukung nilai subtansial dari profesionalitas guru diperlukan beberapa penjelasan mengenai cirri-ciri profesionalitas guru.

Adapun dibawah ini dikemukakan beberapa pendapat para tokoh mengenai cirri-ciri professional. Diantaranya:

Sebagaimana diungkapkan C.V.Good yang dikutip oleh Drs. Samana, menjelaskan bahwa jenis pekerjaan yang berkualifikasi professional memiliki ciri-ciri tertentu yaitu memerlukan persiapan atau pendidikan khusus bagi calon pelakunya (membutuhkan pendidikan prajabatan yang relevan),kecakapan seorang pekerja professional dituntut memenuhi persyaratan yang telah dibakukan oleh pihak yang berwenang,misalnya: organisasi professional, konsorsium, pemerintah, dan jabatan professional tersebut mendapat pengakuan dari masyarakat atau Negara.

Secara lebih rinci, diungkapkan bahwa ciri-ciri jabatan professional adalah sebagai berikut:

a. Pelakunya dituntut secara nyata (de facto) untuk berkecakapan kerja sesuai dengan tugas khusus jabatannya (spesialisasi).
b. Kecakapan atau keahlian pekerja bukan sekedar latihan rutin yang terkondisi, tetapi perlu didasari oleh wawasan keilmuan yang mantap, jadi jabatan professional menuntut pendidikan prajabatan yang terprogram, secara relevan dan berbobot, terselenggaranya secara efektif, efisien dan tolak ukur evaluatifnya standart.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pekerja dituntut berwawasan sosial yang luas, bersikap positif terhadap jabatan dan perannya, bermotivasi, serta berusaha untuk berkarya sebaik baiknya, hal ini mendorong pekerja yang bersangkutan untuk selalu meningkatkan (menyempurnakan) diri serta karyanya, orang tersebut secara nyata mencintai profesinya dan memiliki etos kerja yang tinggi.

d. Jabatan professional perlu mendapatkan pengesahan dari masyarakat atau negaranya. berkaitan dengan ini, pendapat serta tolak ukur yang dikembangkan oleh organisasi profesi sepantasnya dijadikan acuanya. Secara tegas jabatan professional memiliki syarat-syarat serta kode etik yang harus dipenuhi oleh pelakunya, hal ini menjamin kepantasan berkarya dan sekaligus merupakan tanggungjawab sosial pekerja professional yang bersangkutan.[43]

Suatu profesi memang menuntut persyaratan yang mendasar baik ketrampilan teknis maupun kepribadian dan tidak semua pekerjaan bisa dikatakan suatu profesi, untuk lebih memperjelas ciri-ciri yang dimaksud, berikut dikemukakan batasan atau ciri-ciri sekaligus syarat-syarat dari suatu profesi.

Robert W. Richey, sebagaimana dikutip Suharsimi Arikunto mengemukakan ciri-ciri dan syarat-syarat profesi, yaitu:

a. Lebih mengutamakan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibanding dengan kepentingan pribadi

[43] A. Samana, *Profesionalisme Keguruan*...,28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Seorang pekerja professional secara relative memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya.

c. Memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut mampu berkembang dalam pertumbuhan jabatan

d. Memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap dan cara kerja

e. Membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi

f. Adanya organisasi yang meningkatkan standar pelayanan, disiplin diri dalam profesi serta kesejahteraan anggotanya

g. Memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi, dan kemandirian

h. Memandang profesi sebagai karir hidup (live career), dan menjadi seorang anggota yang permanen.[44]

Disamping hal diatas, sebenarnya masih ada persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh setiap pekerjaan yang tergolong dalam satu profesi, yaitu:

a. Memiliki kode etik sebagai acuan dalam melakukan tugas dan fungsinya

b. Memiliki klien atau obyek layanan yang tetap seperti dokter dengan pasiennya, dan guru dengan muridnya

c. Diakui oleh masyarakat karena memang diperlukan jasanya di masyarakat.[45]

---

[44] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pengajaran*....,235-236
[45] M.Uzer Usman, *Menjadi Guru*...,15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa uraian diatas dapat ditarik sebuah konklusi bahwa jabatan guru tergolong jabatan professional, karena telah memiliki ciri-ciri yang sudah dikemukakan oleh para ahli di atas, walaupun sejauh ini belum berjalan secara maksimal. namun upaya untuk mencapai standar guru professional, pemerintah terus berupaya untuk menggapainya. Selain dengan kebijakan dan usaha pemerintah hal ini juga tergantung niat, prilaku, dan komitmen dari guru sendiri dan organisasi yang berhubungan dengan itu.

3. Aspek Profesionalitas dan Kompetensi Guru.

a. Aspek Profesionalitas.

Penjelasan tentang makna konsep dan aplikasi professional tidak lepas dari beberapa aspek penting yang saling terkait satu sama lain, yaitu berkaitan dengan aspek pengetahuan, (knowledge), ketrampilan (skill) dan aspek sikap mental (attitude). Yang terakhir ini memiliki catatan khusus yang melekat dalam diri professional sejati, yaitu terbuka terhadap pendapat ataupun nilai-nilai baru yang lebih positif, menerima perbedaan pendapat serta berlaku jujur.

Pengetahuan, ketrampilan dan mental adalah setara dan sama pentingnya sebagai fondasi yang mana kualitas-kualitas professional itu dibangun dan dikembangkan serta diasah secara terus menerus. Kombinasi ketiga komponen itu pulalah substansi konsep professional.

Dengan demikian setiap orang yang berkarya di bidang apapun pada dasarnya menyandang predikat professional. Sepanjang proses kerja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan berbagai hasil kerjanya berbasis pada substansi professional tersebut (pengetahuan, ketrampilan, dan mental), dengan kata lain, professional bukan jabatan atau posisi, melainkan kualitas-kualitas fungsional dengan kriteria dan standar bagi setiap jenis pekerjaan, tingkatan. Jabatan atau posisi setiap komponen dalam suatu struktur sampai pada setiap orang di suatu unit atau satuan kerja.

Pemahaman dan penerapan substansi professional ini memang perlu diperluas hingga semua bidang kehidupan. di setiap level dalam organisasi, misalnya dituntut untuk memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang relevan, serta sikap mental yang mendukung optimalisasi fungsi satuan kerjanya sebagai konstribusi bagi kinerja organisasinya, sudah seharusnya membekali diri dengan ketrampilan yang sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.[46]

b. Kompetensi Guru

Kompetensi adalah suatu tugas yang mamadai, pemilikan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan dituntut oleh jabatan seseorang. Dalam pengertian ini, kompetensi lebih menitikberatkan pada tugas guru dalam mengajar.[47] Dengan demikian dapat diartikan bahwa kompetensi guru adalah kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya.

---

[46] Tantri Abeng, *Dari Meja Tanri Abeng*, (Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 1997) 3
[47] Roestiyah N.K, *Didaktik Metodeik* (Jakarta;Bumi Aksara, 1994) 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam usahanya meningkatkan profesionalitas guru, proyek pengembangan pendidikan guru (P3G) telah merumuskan tiga kemampuan penting yang harus dimiliki seorang guru professional. Ketiga kemampuan tersebut dikenal dengan "tiga kompetensi", yaitu;

1) Kompetensi professional, artinya bahwa guru harus memiliki pengetahuan yang luas serta mendalam tentang subject matter (bidang studi) yang akan diajarkan, serta penguasaan metodologis dalam arti memiliki pengetahuan konsep teoritik, mampu memilih metode yang tepat serta mampu menggunakannya dalam proses belajar mengajar. [48]

   Kompetensi professional dipandang sebagai hal yang paling urgen untuk dikuasai oleh guru. Untuk mengetahui gambaran secara detail, berikut disajikan rumusan yang dihasilkan oleh P3G yang kemudian disebut juga kompetensi dasar guru,[49] antara lain;

   a) Menguasai bahan;
      - Menguasai bahan bidang studi dalam kurikulum sekolah.
      - Menguasai bahan pendalaman aplikasi bidang studi.
   b) Mengelola program belajar mengajar;
      - Merumuskan tujuan instruksional.
      - Mengenal dan dapat menggunakan metode mengajar.
      - Memilih dan menyusun prosedur instruksional yang tepat.

[48] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pengajaran*..... 238
[49] Roestiyah N.K, *Didaktik Metodeik*.....6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Melaksanakan program belajar mengajar.
- Mengenal kemampuan (entry behavior) anak didik.
- Merencanakan dan melaksanakan pengajaran remedial.

c) Mengelola kelas;

- Mengatur tata ruang kelas.
- Menciptakan iklim belajar mengajar yang berarti.

d) Menggunakan media/sumber;

- Mengenal, memilih dan menggunakan media.
- Membuat alat bantu pelajaran sederhana.
- Menggunakan dan mengelola laboratorium dalam PBM.
- Mengembangkan laboratorium.
- Menggunakan perpustakaan dalam PBM.
- Menggunakan micro teaching unit dalam program pengalaman lapangan.

e) Menguasai landasan-landasan kependidikan.

f) Mengelola interaksi belajar mengajar.

g) Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran.

h) Mengenal fungsi dan layanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah;

- Mengenal fungsi dan program layanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Penyelenggaraan program layanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah.

i) Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah;

- Mengenal penyelenggaraan administrasi sekolah.
- Menyelenggarakan administrasi sekolah.
- Memahami prinsip-prinsip dan menjelaskan hasil-hasil penelitian kependidikan guna keperluan pengajaran.

j) Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan.

2) Kompetensi personal adalah guru harus memiliki sikap kepribadian yang mantap sehingga mampu menjadi sumber intensifikasi bagi subyek, maksudnya adalah ia harus memiliki kepribadian yang patut diteladani seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro "Ing Ngarso Sung Tulodho Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani".

3) Kompetensi social adalah guru harus memiliki kemampuan berkomunikasi social, baik dengan murid-muridnya maupun yang sesama guru, dengan kepala sekolah, pegawai atau tata usaha, dan dengan anggota masyarakat.[50]

---

[50] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pengajaran....* 239-240

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Profesionalitas Guru.

Tradisionalisme berpandangan bahwa guru adalah orang yang berdiri di depan kelas untuk menyampaikan ilmu pengetahuan.

Ada juga pengertian lain yang menyebutkan bahwa guru adalah seorang yang karena panggilan jiwanya, sebagian besar waktu, tenaga dan fikirannya digunakan untuk mengajarkan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan sikap kepada orang lain di sekolah atau lembaga pendidikan formal.[51]

Sedangkan menurut Hadari Nawawi, guru secara etimologis berarti orang yang berkewajiban mewujudkan program kelas yaitu orang yang kerjanya mengajar atau memberikan pelajaran di sekolah/kelas. Secara lebih luas, guru berarti orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang ikut bertanggung jawab dalam membentuk anak didik mencapai kedewasaan masing-masing. Akhir-akhir ini orang berpandangan bahwa guru bukanlah orang yang hanya berdiri di depan kelas untuk menyampaikan materi pengetahuan tersebut. akan tetapi adalah anggota masyarakat yang ikut aktif dan berjiwa bebas secara kreatif dalam mengarahkan perkembangan anak didiknya untuk menjadi anggota masyarakat sebagai orang dewasa.[52]

Menjadi seorang guru bukanlah semudah membalikkan telapak tangan, karena kita tidak hanya harus melakukan improvisasi terhadap pembelajaran

---

[51] Hadi Supeno, *Potret Guru*, (Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 1995) 27

[52] Hadar Nawawi, *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas sebagai Lembaga Pendidikan*, Jakarta, Haji Massagung, 1989. hlm 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi juga dituntut untuk bertanggung jawab dalam berbagai hal. Peters mengemukakan ada tiga tugas dan tanggung jawab guru, yaitu;

a. Guru sebagai pengajar.
b. Guru sebagai pembimbing.
c. Guru sebagai administrator kelas.

Guru sebagai tenaga pengajar lebih menekankan tugas dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran. Dari itu guru dituntut untuk memiliki pengetahuan dan ketrampilan teknik mengajar disamping menguasai ilmu atau bahan yang akan diajarkannya. Guru sebagai pembimbing menekankan pada tugas, memberikan bantuan kepada siswa dalam pemecahan masalah yang dihadapinya. Tugas itu merupakan aspek mendidik sebab tidak hanya berkenaan dengan penyampaian ilmu pengetahuan tetapi juga menyangkut perkembangan kepribadian dan pembentukan nilai-nilai para siswa.

Berkaitan dengan ini, Amstrong membagi tugas dan tanggung jawab guru ke dalam lima hal, yaitu;

a. Tanggung jawab dalam pengajaran.
b. Tanggung jawab dalam memberikan bimbingan.
c. Tanggung jawab dalam mengembangkan kurikulum.
d. Tanggung jawab dalam mengembangkan profesi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Tanggung jawab dalam membina hubungan dengan masyarakat.[53]

Sodiq A. Kuntoro memperjelas tentang keprofesian guru, ia melihat bahwa guru sekarang dituntut dengan adanya kualifikasi yaitu untuk lebih tahu tentang masalah-masalah penting yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, dan tahu akan tugas belajar mengajar yang efektif, juga pengasaan yang lebih baik di bidang pengetahuan spesialisasi yang diajarkan.[54]

Profesionalisme di bidang pendidikan mendapat pengakuan karena tiga alasan;

a. Lapangan pekerjaan keguruan atau kependidikan bukan merupakan suatu lapangan kerja rutin yang dapat dilakukan karena pengulangan-pengulangan atau pembiasaan, dan tidak dapat dilakukan berdasarkan amatirisme atau coba-coba (trial and error), tetapi memerlukan perencanaan yang mantap dan suatu manajemen yang memperhitungkan komponen-komponen sistemnya.
b. Lapangan kerja ini memerlukan dukungan ilmu atau teori yang akan memberi konsepsi teoritis ilmu kependidikan dengan cabang-cabangnya.
c. Lapangan kerja ini memerlukan waktu pendidikan dan latihan yang lama, berupa pendidikan dasar (basic education) untuk taraf sarjana ditambah dengan pendidikan professional.

---

[53] Cece Wijaya, *Kemampuan Dasar Guru dalam Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994. hlm 24

[54] Hadi Supeno, *Potret Guru*, ... 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, jelaslah bahwa jabatan guru adalah jabatan profesi karena menuntut keahlian dan ketrampilan khusus di bidang pendidikan dan pengajaran, oleh karena itu tidak semua orang bisa melaksanakannya. Guru juga bukan sebagai jabatan okupasi atau dengan kata lain hanya sekedar hobi atau kegemaran, dan guru juga bukan jabatan vokasional atau kejuruan belaka, tetapi guru adalah jabatan profesional.

C. Peran Perencanaan Partisipatori dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru

Dengan adanya kebijakan nasional untuk memajukan pemikiran mengenai partisipatori masyarakat, sebagaimana ditegaskan oleh UUSPN (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional) no 20 Tahun 2003 pasal 8 yang menyatakan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Pernyataan ini memberi ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk ikut langsung dalam manajemen sekolah. Keikutsertaan masyarakat dalam menyusun rencana sekolah dimaksudkan untuk mengetahui harapan masyarakat terhadap sekolah, dan disamping itu, keikutsertaan masyarakat atau stakeholder juga dimaksudkan untuk menjamin bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan sekolah sesuai dengan yang direncanakan.[55]

Selanjutnya, UUSPN No, 20 Tahun 2003 pasal 54 ayat (1) mengemukakan bahwa peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan

[55] Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional...*, 248

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.[56] Dan juga dijelaskan dalam pasal 56 ayat (1) yang menyatakan bahwa masyarakat berperan peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah. Sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.[57]

Dewan pendidikan dan komite sekolah yang secara umum disebut stakeholder pendidikan mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas di daerahnya. Organisasi dewan pendidikan dan komite sekolah bertujuan;

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan.
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, demoktratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.[58]

---

[56] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *HImpunan Perundang-undangan RI Tentang Guru dan Dosen.* (Bandung; Nuansa Aulia, 2006) 134

[57] Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional...*, 249

[58] Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional...*, 251

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Negara-negara maju terutama yang menganut sistem desentralisasi sekolah dikreasikan dan dipertahankan oleh masyarakat. Kesadaran mereka sebagai pemilik dan penangung jawab lembaga pendidikan sudah tinggi. Partisipasi mereka sudah besar baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam melakukan control. Mereka benar-benar merasa memiliki sebab sumbangan moral dan material mereka cukup besar terhadap keberlangsungan hidup lembaga pendidikan karena mereka yakin bahwa pendidikan adalah modal utama bagi peningkatan kehidupan keluarga, masyarakat, dan bangsa.[59]

Para stakeholder ini baik sebagai warga masyarakat maupun sebagai warga lembaga pendidikan perlu ditanyai secara sungguh-sungguh agar perencanaan pendidikan dan pelaksanaan pendidikan dapat berjalan dengan lancar. Dalam memperhitungkan fisibilitas perencanaan pendidikan yaitu sumber-sumber pendidikan yang berkaitan dengan mereka, memegang peranan penting yang patut diperhitungkan, disamping itu para stakeholder juga patut diperhatikan sebab ia dapat menggoncangkan implementasi dan aplikasi pendidikan berkat pengaruh-pengaruhnya.[60]

Dalam uraian terdahulu sudah berulangkali dijelaskan bahwa kegiatan-kegiatan perencanaan pendidikan dan kegiatan-kegiatan pendidikan pada umumnya tidak pernah dapat dilepaskan dari masyarakat, terutama masyarakat di sekitarnya, sebab ada hubungan saling memberi, saling mendukung, dan saling

---

[59] Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia,* (Jakarta; Bina Aksara, 1988) 198
[60] Made Pidarta, *Perencanaan Pendidikan...,* 218

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menguntungkan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat. Itu pula sebabnya mengapa masyarakat diharapkan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan dan kelancaran proses pendidikan dalam lembaga pendidikan diharapkan sekerja sama secara erat dengan masyarakat.[61]

Dengan demikian, peran serta stakeholder pendidikan dalam suatu perencanaan adalah hal yang sangat urgen sehingga akan dampak pada peningkatan profesionalitas guru. Hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 bahwa stakeholder pendidikan yaitu dewan pendidikan dan komite sekolah dalam kaitannya dengan hal di atas mereka memiliki 4 peran, yaitu;

1. Peran Sebagai Pemberi Pertimbangan Atau Nasihat (Advisory Agency)

   Peran sebagai pemberi pertimbangan atau nasihat (Advisory Agency) menunjukkan respon dan keikutsertaan dewan pendidikan dan komite sekolah memajukan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di daerah dan di sekolah. Bentuk aktivitas dewan pendidikan dan komite sekolah antara lain;

   a. Pemberi pertimbangan mengenai program dan kegiatan yang disusun dalam rencana pembangunan pendidikan tingkat kabupaten atau kota dan RKS serta RKT tingkat satuan pendidikan.
   b. Memberikan pertimbangan buat guru dalam pelaksanaan tugas supaya tidak sewenang-wenang dalam menangani siswa (misalnya dalam

[61] Made Pidarta, *Perencanaan Pendidikan...*, 217

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberi hukuman tetapi juga memberi penghargaan bagi yang berprestasi).

c. Memberi pertimbangan dalam peningkatan disiplin guru dan memberi solusi bagi kesulitan-kesulitan yang dihadapi guru.

d. Memberi pertimbangan dalam mengembangkan bakat dan minat siswa (seperti olimpiade mata pelajaran, seni dan olah raga).[62]

2. Peran Sebagai Badan Pendukung (Supporting Agency)

Peran pendukung dewan pendidikan dan komite sekolah berkaitan dengan internal manajemen sekolah;

a. Mendata jumlah guru yang memerlukan pendidikan dan latihan, mendata pendidikan guru yang memerlukan peningkatan kualifikasi pendidikan.

b. Memberikan pelatihan mengenai mata pelajaran dan layanan belajar bagi guru yang membutuhkan.

c. Mendata jumlah siswa dan indeks prestasinya, guru dan komite sekolah.

d. Mendukung program pengayaan bagi siswa yang lebih pintar, dan remedial bagi siswa yang belum mencapai hasil yang dipersyaratkan.

e. Menyediakan tropi dan hadiah atas keberhasilan siswa mengikuti berbagai perlombaan yang dilakukan sekolah.

f. Untuk meningkatkan kualitas keagamaan mengadakan pesantren kilat di sekolah.

---

[62] Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional....,256-257*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Mendukung pemanfaatan sarana prasarana untuk memberikan layanan belajar.

h. Membuat media belajar sesuai dengan kebutuhan belajar.

i. Kebun percontohan sekolah.

j. Memaksimalkan anggaran operasional yang bersumber dari APBD, bantuan masyarakat, dan mendorong penggunaan anggaran yang bersumbar dari dana BOS dengan mengimplementasikan program dan kegiatan yang tepat sasaran.

Pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan harus disampaikan pada publik atau stakeholder pendidikan, kepala sekolah, orang tua dan masyarakat, serta kepada instansi pemerintah yang terkait seperti dinas pendidikan, termasuk pemimpin proyek yang bersangkutan. Dewan pendidikan dan komite sekolah, dalam batas-batas tertentu dapat saja memberikan rekomendasi pada pihak yang terkait, dengan rasional yang kuat dan obyektif bukan karena atas faktor *"like and dislike"* dalam hal ketenagaan ini, dewan pendidikan dan komite sekolah perlu mengembangkan standar kinerja guru dan tenaga kependidikan lainnya.[63]

3. Peran Sebagai Pengontrol (Controling Agency)

Peran sebagai pengontrol (controlling agency) sesuai peran dewan pendidikan dan komite sekolah, sebagai badan pengawas terhadap kegiatan sekolah termasuk pelaksanaan dan penggunaan Rencana Kegiatan Sekolah

[63] Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional...,258*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(RKS) dan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT). Fungsi pengontrol (controling agency) menunjukkan bahwa dewan pendidikan dan komite sekolah melakukan aktifitas;

a. Menanyakan proses belajar mengajar (ke guru dan kepala sekolah) apakah sudah mengarah pada standar yang dipersyaratkan,
b. Menanyakan kondisi kesehatan, gizi, dan bakat peserta didik,
c. Memantau pelaksanaan rencana kegitan sekolah (RKS) dan rencana kegiatan tahunan (RKT),
d. Ikut serta dalam penyusunan RKS dan RKT.
e. Ikut memantau penggunaan anggaran yang bersumber dari BOS,
f. Ikut serta dalam rapat pembagian raport,
g. Mengontrol kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya,
h. Mengontrol pelaksanaan PBM dengan memakai kartu data sesuai dengan perlindungan anak; cara belajar mengajar guru (misalnya kartu yang ditanda tangani oleh guru dan orangtua).[64]

4. Peran Sebagai Penghubung (Mediating Agency)

Pusat pendidikan adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat harus saling bekerja sama secara sinergis untuk meningkatkan mutu pendidikan. Untuk dapat bekerja secara sinergis harus ada yang menghubungkan antara keluarga, sekolah dan masyarakat. Itulah sebabnya salah satu peran dewan pendidikan dan komite sekolah adalah peran penghubung (mediating agency).

[64] Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional...,259*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika ada kerja sama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat, maka dari beberapa banyak program yang inovatif dapat dicoba untuk dilaksanakan oleh sekolah. Peran penghubung atau mediating agency menunjukkan bahwa dewan pendidikan dan komite sekolah;

a. Menghubungkan dengan instansi pemerintah,
b. Menghubungi orangtua siswa yang mampu untuk meminta kesediaannya menjadi donator atau bantuan lainnya yang disetujuinya untuk keperluan sekolah, atau dengan menjelaskan program kerja yang akan dilakukan oleh sekolah.
c. Mencari informasi yang bisa dipakai oleh sekolah untuk mengembangkan sekolah.
d. Member laporan kepada masyarakat tentang keuangan dan pelaksanaan program.

Keempat peran dewan pendidikan dan komite sekolah tersebut dalam melakukan aktifitas bukanlah melakukan dan perannya secara terpisah-pisah, tetapi berlangsung secara simultan. Dalam melakukan aktifitasnya, mereka mengedepankan peningkatan kualitas pendidikan, bukan menyalurkan kehendaknya pribadi apalagi melakukan pemerasan. Dalam melaksanakan perannya dilakukan secara seimbang dengan memperhatikan etika dan aturan yang berlaku serta focus pada perolehan mutu yang kompetitif.[65]

---

[65] Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional...,260*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id